

**Kegagalan Partai Komunis Indonesia pada Pemilihan Umum 1955
di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara**
*The Failure of the Indonesian Communist Party at General Election in 1955
in the Electoral District of South/South East Sulawesi*

Idwar Anwar, Suriadi Mappangara, Ilham

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin^{1,2}
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kota Makassar, 90245
idwaranwar.i@gmail.com

Naskah diterima 23-11-2021. Naskah direvisi 10-12-2021. Naskah disetujui 12-12-2021

ABSTRACT

General Election in 1955, the Indonesian Communist Party (PKI) finished fourth in the national vote. The Electoral District (Dapil) of Java island earned the bulk of these votes, accounting for 35 seats in the House of Representatives (90 percent) (DPR). PKI was unable to collect votes for DPR in the South/Southeast Sulawesi electoral district and could only secure one member in the Constituent Assembly. Based on the primary sources obtained, this study employs historical research approaches (heuristics, critique or verification, interpretation, and historiography) to analyze the multiple reasons behind PKI's inability to garner votes in the South/Southeast Sulawesi seats. The findings revealed that PKI lacked an effective internal network of party institutions and failed to identify appropriate parliamentary candidates. Externally, there was severe competition, particularly from Masyumi, an Islamic Party that was highly active in accusing the PKI of being anti-religion and anti-God, making it difficult for the PKI to develop. PKI was also not well received due to the society's religious ethos. Furthermore, PKI received a severe denial from Kahar Muzakkar. The rebel leader, Kahar Muzakkar, was willing to sabotage the 1955 elections.

Keywords: *Indonesian Communist Party (PKI), General Election (Pemilu) of 1955, Political Party, Electoral District (Dapil)*

ABSTRAK

Pemilihan Umum 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil menempati posisi keempat perolehan suara secara nasional. Suara ini mayoritas diperoleh dari Daerah Pemilihan (Dapil) di pulau Jawa, yakni sebanyak 35 kursi (90%) dari 39 total kursi PKI di DPR. PKI tidak mampu mendapatkan suara untuk DPR dan hanya berhasil mendapatkan satu kursi untuk Konstituante di Dapil Sulawesi Selatan/Tenggara. Berdasarkan metode penelitian sejarah (heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi dan historiografi), kajian ini menguraikan berbagai penyebab terkait ketidakmampuan PKI mendulang suara di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara, khususnya berdasarkan sumber-sumber primer yang ditemukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara internal, PKI tidak memiliki jejaring struktur partai yang baik dan kurang tepat dalam menempatkan calon legislatif yang diusung. Secara eksternal, persaingan keras, utamanya dengan Masyumi yang sangat giat menuding PKI sebagai partai yang antiagama dan Tuhan, membuat PKI sulit berkembang. Kultur masyarakat yang religius yang menyebabkan PKI tidak diterima dengan baik. Ditambah lagi dengan kerasnya penolakan Kahar Muzakkar terhadap PKI. Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan ketika itu, bahkan sangat berkeinginan untuk menggagalkan pemilu 1955.

Kata kunci: Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, Partai Politik, Daerah Pemilihan (Dapil)

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan hingga saat ini, bangsa Indonesia telah mengalami dua belas kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu pertama dilaksanakan secara nasional oleh bangsa Indonesia, yakni pada tahun 1955. Pemilu tahun tersebut menjadi momentum penting dalam uji coba sistem pemerintahan di Indonesia yang baru saja merdeka.

Setelah melalui berbagai proses pembuatan undang-undang pemilu dan kerasnya dinamika di parlemen dan jatuh bangunnya kabinet, akhirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berhasil disahkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu 1955. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 ini (selanjutnya kadang dituliskan Undang-undang Pemilihan Umum atau Undang-undang Pemilu), tentu berbeda dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-partai Politik yang di dalamnya juga termaktub rencana pelaksanaan pemilu pada Januari 1946. Poin ini menjadi semangat awal dalam pelaksanaan pemilu, di mana yang dimaksudkan pada awalnya adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Kempen [a], 1950: 3).

Apabila merujuk pada maklumat Wakil Presiden ini terlihat adanya perubahan pemilihan. Dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menjadi pemilihan anggota Konstituante berdasarkan Undang-undang Pemilu 1953. Perubahan ini terkait dengan kondisi pemerintahan yang masih berdasarkan pada UUD Sementara 1950. Oleh karena itu, konstituante dibentuk

menjadi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara, khususnya untuk menyusun Undang-undang Dasar yang lebih komprehensif dan permanen sebagai pengganti UUD Sementara 1950.

UUD Sementara 1950 merupakan sebuah evolusi dari sistem pemerintahan masa revolusi. Oleh sebab itu, tampak jelas bahwa para pemimpin Indonesia ketika itu bermaksud mengganti UUDS tersebut yang disusun oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara demokratis. Berdasarkan hal tersebut, sejak Kabinet Syahrir hingga Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintah selalu mencanangkan pelaksanaan pemilu sebagai program kerja prioritas. Kendati demikian, barulah setelah sepuluh tahun kemerdekaan Indonesia, pemilihan umum baru dapat dilaksanakan.

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Berbagai kajian tentang pemilu telah banyak dilakukan dan diterbitkan, baik di jurnal maupun dalam bentuk buku. Secara umum, kajian pemilu dan tentang partai politik dapat dilihat pada buku *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* yang ditulis Muhadam Labolo dan Teguh Ilham (2015).

Dalam buku ini, terdapat dua tema penting yang diuraikan, yaitu partai politik dan sistem pemilu. Dua pokok bahasan ini menjadi jalan masuk untuk mengurai sejarah sistem politik yang berlaku di Indonesia, termasuk sejarah perkembangan partai politik. Keberadaan partai politik dan adanya sistem politik tentu menjadi penentu terhadap pilihan suatu negara dalam mengelola negaranya, apakah memilih sistem totaliter, otoriter ataupun demokrasi.

Diberlakukannya sebuah sistem politik tentu berkenaan dengan semua perangkat norma yang menjadi konsensus bersama dalam sebuah negara. Pada masa awal kemerdekaan,

bangsa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem dalam pengelolaan negara, khususnya dalam hal politik. Hal ini terlihat jelas dengan dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang mengimbau kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik.

Buku yang mengurai secara spesifik tentang sejarah politik, khususnya pemilu 1955, telah banyak ditulis dan diterbitkan. Salah satunya dapat dilihat dari karya Herbert Feith yang merupakan penelitian pertama terhadap pemilu di Indonesia yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *The Indonesian Elections of 1955* yang diterbitkan Cornell University (1957). Buku ini kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (1999). Buku ini mengurai secara umum kondisi pemilu 1955, termasuk mengungkapkan situasi dan kondisi di lapangan pada masa pemilihan.

Kajian-kajian tentang partai politik dan pemilu, khususnya pemilu 1955, tidak hanya berfokus pada Jakarta, tetapi juga banyak dilakukan di daerah-daerah. Demikian pula di Sulawesi Selatan yang pada pemilu 1955, masuk dalam daerah pemilihan XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Kajian ini dapat dilihat pada tesis Burhaman Junedding berjudul *Pesta Demokrasi Di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal Dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan* (2010). Tesis ini membahas tentang pengaruh dinamika politik di tingkat lokal dan politik lokal terhadap proses dan hasil pemilihan umum 1955 di Sulawesi Selatan.

Sebuah karya yang menarik terkait mengenai PKI ditulis Taufik Ahmad berjudul *Kamp Pengasingan Moncongloe* (2008). Walaupun mengkaji tentang kamp pengasingan orang-orang PKI setelah peristiwa 30 September 1965. Namun, karya ini dalam salah satu babnya, mengurai tentang sejarah dan perkembangan PKI di

Sulawesi Selatan. Buku ini dapat membantu dalam mengembangkan perspektif dalam melihat PKI setelah pemilu 1955 yang tentu ada korelasinya dengan masa sebelum dan saat pelaksanaan pemilu 1955. Kajian Taufik mengenai PKI juga muncul dalam Jurnal Patanjala dengan judul *Mengail di Air Keruh: Gerakan PKI di Sulawesi Selatan 1950-1965* (2014: 301-314).

Walaupun demikian, kajian yang berfokus pada PKI dan bagaimana pergulatannya dalam mendapatkan suara pada pemilu 1955, belum pernah dilakukan secara komprehensif. Beberapa karya yang disebutkan sebelumnya, hanya memasukkan PKI bersama beberapa partai lainnya sebagai kontestan yang bertarung dalam pemilu 1955 di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara. Bahkan tak satu pun yang menyajikan data tentang kepengurusan PKI pada pemilu 1955.

Olehsebabitu, kajian yang komprehensif mengenai sepak terjang PKI pada pemilu 1955 di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara ini penting dilakukan. Terlebih berdasarkan data, terungkap bahwa mayoritas suara PKI (90%) didapatkan di Jawa dan tidak tersebar merata di seluruh daerah pemilihan Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan kritis, salah satunya mengapa PKI tidak dapat meraih suara signifikan pemilu 1955 di seluruh daerah pemilihan, terutama di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara?

Secara garis besar, ada dua faktor penting yang mendukung kemenangan sebuah partai politik pada pemilu 1955, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, penelitian ini akan mengkaji, bagaimana PKI membangun jejaring struktur partai di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara dan strategi PKI melakukan rekrutmen politik, termasuk dalam memilih calon legislatif yang akan yang diusung? Faktor eksternal, bagaimana PKI menghadapi persaingan keras dengan peserta pemilu, utamanya dengan Masyumi yang sangat giat menuding PKI

sebagai partai yang anti agama? Bagaimana PKI menghadapi pemberontakan Kahar Muzakkar yang sangat keras menentang ideologi komunis (PKI), bahkan ingin menggagalkan pemilu 1955? Beberapa pertanyaan tersebut diuraikan dalam hasil penelitian ini. Kajian ini tetap berpijak pada corak dasar sejarah yang sifatnya memanjang dalam waktu (diakronis). Namun, dapat memberikan nuansa lain sehingga tulisan ini dapat mengembang dalam ruang (sinkronis) dalam berbagai perspektif.

METODE

Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya, kajian ini didasarkan pada metode penelitian sejarah yang runtut, yakni heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Metode ini diperlukan sebagai proses yang dimulai dengan melakukan penelusuran data (heuristik), melakukan analisis sejarah kritis (kritik atau verifikasi sumber) untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu (interpretasi) yang kemudian dituliskan sebagai hasil akhir dari metode kerja yang sistematis dalam ilmu sejarah (historiografi).

Penelusuran sumber awal dari penelitian ini diperoleh arsip pemerintah dan arsip-arsip koran, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Belanda. Sebagai sumber primer (yang merupakan sumber paling penting dalam penelitian sejarah), peneliti mengambil data dari Arsip Kantor Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa surat kabar, baik terbitan Makassar, nasional maupun yang terbit di luar negeri yang berisi tentang pemilu 1955 di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kahar Muzakkar dan PKI.

Beberapa sumber-sumber tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai dinamika politik dan kepartaian di Sulawesi Selatan, termasuk terjadinya peristiwa Kahar Muzakkar. Dengan demikian, data-data yang bersumber dari media-media tersebut,

peneliti mendapatkan banyak informasi yang sangat mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pemilu dan Partai Politik

Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah pemilihan pada pemilu 1955 merupakan wilayah yang cukup penting dan menentukan dinamika politik di Indonesia. Terbentuknya Sulawesi sebagai salah satu provinsi pertama di Indonesia dengan ibu kota Makassar, tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menunjukkan posisi Sulawesi Selatan di masa awal kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi ketika Makassar kembali menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur (NIT), di mana NIT merupakan salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memiliki wilayah paling luas dari semua negara bagian RIS.

Meskipun demikian, untuk memahami dinamika politik yang terjadi di wilayah ini, tentu tidak dapat pula dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi di Jakarta yang merupakan pusat kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia setelah kembali ke negara kesatuan. Dinamika politik ini dimotori oleh partai-partai politik yang mulai menjamur, khususnya ketika dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tentang pemilu dan partai politik.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, selain terjadinya perebutan kekuasaan di kabinet antara partai-partai politik, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, juga terjadi perbedaan ideologi antarpartai. Perbedaan ini semakin meruncing, khususnya menjelang pemilu 1955. Jatuh banggunya kabinet tidak dapat dipungkiri merupakan imbas dari perebutan kekuasaan dan pertarungan ideologi. Perebutan kekuasaan dan pertarungan ideologi di tingkat pusat langsung atau tidak,

memberikan pengaruh di daerah-daerah, salah satunya di Sulawesi Selatan/Tenggara.

Menjelang pelaksanaan pemilu 1955, ketegangan ini semakin terlihat, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Hal ini terkait dengan besarnya ambisi setiap partai untuk mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat yang akan berimbas pada banyaknya perolehan kursi di DPR dan Konstituante. Dengan demikian, partai dapat membentuk dan menguasai kabinet.

Perebutan kekuasaan dan terjadinya pertarungan ideologi ini bukan hanya terjadi pada tataran ide atau di parlemen/kabinet, melainkan berimbas hingga ke masyarakat dengan munculnya bibit-bibit pengelompokan. Salah satu akibatnya adalah terjadinya beberapa pemberontakan, seperti pemberontakan PKI di Madiun dan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat. Bahkan pemberontakan DI melebar ke beberapa daerah, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Tidak seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DI berlangsung lama, bahkan pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan yang pada 1952 (De Vrije Pers, 1952: 1) bergabung dengan DI berlangsung hingga tahun 1965. Tidak mengherankan jika pada pemilu 1955 terdapat tiga daerah berbahaya (Zona Merah) di Indonesia, yakni Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pemberian label Zona Merah ini disebabkan dalam proses pelaksanaan pemilu 1955 terjadi pemberontakan DI/TII yang berpusat di tiga wilayah tersebut. Daerah Sulawesi Selatan yang masuk dalam dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara merupakan dapil terparah dan sangat berbahaya. Banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah ini dengan tujuan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu 1955.

Menjamurnya partai politik, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu 1955, memberikan dampak makin memanasnya pertarungan ideologi di antara partai-partai

politik yang secara garis besar digolongkan ke dalam tiga golongan besar dasar partai, yakni antara partai dengan Dasar Keagamaan (Ketuhanan), Dasar Kebangsaan, dan Dasar Sosialisme atau Marxisme (Kempen [b], 1954: 17-575). Pertarungan ini tidak hanya untuk mendapatkan dukungan rakyat (suara), tetapi adanya keinginan menjadikan ideologi politik partai menjadi ideologi negara.

Meskipun pertarungan ideologi ini terjadi sejak sebelum kemerdekaan, namun pertarungan itu tidak begitu frontal, kecuali pemberontakan yang dilakukan PKI terhadap pemerintah Belanda pada 1926. Hal ini disebabkan oleh perhatian para tokoh partai tersebut masih terpusat pada perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kekuatan bangsa dipersatukan dalam satu gerak perjuangan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah tanpa memandang suku, agama, ras, dan ideologi politiknya.

Apa yang terjadi di pusat pemerintahan, pengaruhnya juga tersebar di semua daerah pemilihan yang ada di Indonesia, termasuk di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara. Menyebarnya wilayah pertarungan ideologi ini karena ingin mendapatkan mayoritas suara di parlemen. Setiap partai politik harus meloloskan kader partai di parlemen sebanyak-banyaknya.

Persebaran kursi di setiap daerah pemilihan, mengharuskan partai-partai berupaya mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di setiap dapil. Partai-partai harus melakukan sosialisasi politik, khususnya dalam membumikan ideologi politiknya kepada masyarakat jauh sebelum pemilu dilaksanakan, membangun dan mendorong partisipasi politik masyarakat, melakukan rekrutmen politik, serta membangun dan menjalin komunikasi politik sebagai salah satu sarana penting dalam dinamika politik. Bahkan kampanye yang dilakukan juga diikuti dengan kampanye negatif (*negative*

campaign) dan kampanye hitam (*black campaign*) untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Terjadinya kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*), tidak hanya menyerang persoalan ideologi partai atau program kerja partai, tetapi juga terkait persoalan gambar partai. Selain itu, partai-partai yang saling serang tidak hanya dilakukan antara partai dengan Dasar Ketuhanan, menyerang partai dengan Dasar Kebangsaan terlebih Dasar Marxisme dan sebaliknya, tetapi juga terjadi antara partai-partai dengan dasar ideologi yang sama (APPS Vol. I, 2003: Reg. 235). Apa yang dilakukan partai-partai tersebut berpotensi mempengaruhi perolehan suara setiap partai. Bahkan, efek kampanye negatif dan kampanye hitam jauh lebih besar berdampak dalam meraih suara daripada sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, atau komunikasi politik yang dilakukan partai-partai.

PKI dalam Pusaran Konflik Menjelang Pemilu 1955

Dalam buku *Lahirnja PKI dan Perkembangannja (1920 - 1955)* Aidit menjelaskan tentang berbagai pergerakan PKI sejak dibubarkan Belanda, hingga tahun 1955 (Aidit, 1955: 18-39). Akan tetapi, setelah proklamasi kemerdekaan dan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, PKI baru muncul kembali berdasarkan Kongres VI PKI pada tanggal 11-13 Januari 1947 di Solo (Kempen [a], 1950: 492).

Meskipun demikian, tidak seperti partai-partai lainnya yang telah lama membentuk cabangnya di delapan provinsi di awal kemerdekaan, berdasarkan laporan PKI yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi, keberadaan PKI di Sulawesi Selatan barulah terbentuk secara resmi pada 1954 dengan dibentuknya Provinsi Komite Partai Komunis Indonesia Timur Selatan

(Propinsi Sulawesi, 1956: 102). Dalam perkembangannya, klaim keberpihakan PKI pada masyarakat tidak serta-merta membuat PKI dapat diterima dengan baik di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Perseteruan ideologi yang terjadi di Jawa, pun terjadi di luar Jawa, termasuk di Sulawesi Selatan. Hal ini ternyata berakibat signifikan, sehingga PKI mengalami resistensi yang besar. Terlebih stigma yang terbangun bahwa PKI merupakan partai yang antiagama dan tidak percaya pada Tuhan sangat masif tersebar di Sulawesi Selatan.

Stigma ini pun terus dihembuskan oleh lawan-lawan politik PKI. Tersebarnya propaganda ini tidak hanya dilakukan oleh partai-partai Islam, khususnya Masyumi, akan tetapi diperkuat oleh gerombolan Kahar Muzakkar. Kuatnya pengaruh dan tekanan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan membuat ketakutan masyarakat untuk bergabung dengan PKI.

Hebatnya serangan terhadap PKI yang sering dituduh antiagama, beberapa kali dijawab, termasuk melalui kampanye-kampanye di wilayah Sulawesi Selatan/Tenggara. Dalam kampanye PKI di Kota Makassar pada 10 September 1955, melalui kegiatan bertema: “Tjeramah Umum PKI Seksi Komite Kota Besar Makassar”, sangat jelas terlihat upaya PKI melakukan konter isu. Pada salah satu spanduk yang terpajang berbunyi, “Bagi Kaum Agama, Memilih PKI Berarti Djaminan Kebebasan Beragama” (APPS Vol. IX No. I, 1996: Reg. 234).

Upaya PKI untuk membebaskan diri dari stigma antiagama (*Indische Courant voor Nederland*, 26 April 1954: 1) memang merupakan pekerjaan berat, terutama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Kondisi ini sangat dirasakan juga di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara, bahkan membuat PKI tidak mampu mendapatkan suara yang signifikan. Meski demikian, PKI tetap berusaha masuk

dalam pusaran politik “arus tengah”, seperti partai nasionalis dengan menyebar luaskan Semboyan PKI di berbagai daerah bahwa, “PNI partai priayi, Masyumi, dan NU partai santri, tetapi PKI partai rakyat (Feith, 1999: 22). Upaya PKI ini ternyata berhasil, khususnya di beberapa daerah pemilihan di pulau Jawa.

Di dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara, serangan terhadap PKI sangat masif dan dilakukan dalam berbagai kesempatan. Selain dilakukan Masyumi, gerombolan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar juga melakukan serangan terhadap PKI (Abdul Qahhar [a], 1962: 17 dan Abdul Qahhar [b] 1962: 11-12). Kondisi ini sangat disadari PKI, sehingga membuat PKI terus berusaha menghabisi DI/TII, khususnya dalam berbagai kebijakan keamanan yang dijanjikan pemerintah.

D.N. Aidit, Sekjen CC PKI, dalam kunjungannya ke Makassar bahkan melakukan serangan terhadap keberadaan DI/TI yang dianggap meresahkan masyarakat. Dalam pertemuannya dengan pemuka-pemuka masyarakat, 11 Maret 1955, D.N. Aidit mengatakan bahwa DI/TII sebagai organisasi yang hanya berkedok agama, dan bukan organisasi Islam.

“Gerombolan DI/TII bukan organisasi Islam, tetapi adalah organisasi bentukan kolonial berkedok agama. Buktinja ialah bahwa dalam bulan Agustus 1954 di Priangan terjtatat 13 buah mesjid dibakar oleh gerombolan DI/TII, selanjutnya pada pertengahan tahun itu juga tertjatat 9.268 jiwa rakyat tidak bersalah mendjadi korban gerombolan, 61.000 buah rumah dibakar, serta jutaan orang dirampok.” (Indonesia Raya, 14 Maret 1955: 2).

Namun resistensi PKI terus diperlihatkan dalam masa-masa kedatangan Aidit, di mana antara 8 dan 28 Maret 1955, beberapa tanda-tanda gambar PKI di Palopo dirusak oleh orang tak dikenal. Menyikapi kasus perusakan ini, Polisi langsung melaksanakan penyelidikan dan akan melakukan tindakan

kepada pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Di samping itu, badan koordinasi untuk keamanan di Provinsi Sulawesi juga mengeluarkan pemberitahuan/pengumuman bahwa yang melakukan perusakan akan dihukum sesuai dengan hukum pemilihan umum. Pengumuman ini ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi, Panglima TT VII Wirabuana, Kepolisian Provinsi Sulawesi dan Pengadilan Negeri Sulawesi (Indische Courant voor Nederland, 20 April 1955: 1). Upaya ini dilakukan pemerintah untuk meredam suasana konflik, khususnya antara partai politik menjelang pemilihan umum.

Di Toraja, konflik dengan Masyumi terlihat jelas dari serang-serangnya terhadap PKI. Dalam berita berjudul “Jang Penting Selamatkan Negara” yang dimuat Pedoman Rakjat (25 Juli 1955: 1), Masyumi bahkan menyebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dimulai dengan komunis, tetapi dilakukan para pahlawan-pahlawan Islam, seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, Imam Bondjol, dan lain-lain. Kaum Komunis Indonesia adalah anak kemarin yang masih bayi dan masih lunak kukunya. Oleh karena itu, sekarang masih mencari udara dan hawa untuk hidup (Burhaman, 2010: 176).

Sebuah laporan tentang pemilihan umum dengan nomor 343/Rhs/4.d./55 yang dikirimkan kepada Japen Kabupaten Luwu dan Japen Provinsi Sulawesi, menyebutkan bahwa Masyumi mengajak rakyat agar tidak memilih PKI dengan berbagai alasan. Masyumi juga menyebar propaganda dan penghinaan kepada PKI, antara lain menyebutkan bahwa PKI itu tidak mengenal agama dan Tuhan, tidak mengenal hukum moral. Masyumi juga melakukan serangan dengan menafsirkan makna palu-arit sebagai sebuah alat untuk menyiksa manusia. Masyumi mengatakan bahwa sabitnya itu dimaksudkan untuk “menyabit leher manusia”, sedang palunya bermakna untuk

“memalu ubun-ubun manusia” sampai mati.

Berdasarkan tafsirnya itu, Masyumi berusaha menimbulkan ketakutan kepada pemilih untuk menusuk PKI. Dampak munculnya ketakutan yang ingin diraih Masyumi tentunya akan berdampak pada keterpilihan Masyumi atau partai yang berada dalam kelompoknya.

Serangan yang dilakukan Masyumi ini merupakan balasan terhadap serangan yang dilakukan sebelumnya oleh PKI. Melalui kampanye keliling yang dilakukan setelah Nyonya Salawati Daud tiba di Toraja sekitar pertengahan Agustus 1955, PKI mengatakan bahwa jika menang dalam pemilu 1955, Masyumi hendak menjadikan Negara Indonesia menjadi negara Masyumi atau Negara Islam.

Oleh karena itu, dengan berdirinya Negara Islam Indonesia versi Masyumi, maka semuanya harus diislamkan dan mata pencarian sebagai peternak babi akan dibasmi. PKI pun menghubungkan Masyumi dengan tindakan yang dilakukan gerombolan DI/TII. Bahkan PKI secara terang-terangan menuding Masyumi sebagai penghubung gerombolan DI/TII dan berbagai provokasi lainnya. Oleh karena itu, PKI mengajak masyarakat agar jangan menusuk bulan-bintang (Masyumi), tapi sebaiknya menusuk palu-arit. Namun, apabila rakyat tidak ingin memilih atau menusuk palu-arit, sebaiknya menusuk saja *tanduk-tedong* (kepala kerbau/banteng PNI).

Perlawanan PKI terhadap Kahar Muzakkar juga dilakukan. Hal ini terlihat jelas pada seruan yang dikeluarkan PKI, termasuk melalui Seksi Komite PKI Sulawesi Selatan. Berdasarkan seruan yang dikeluarkan di Makassar pada 22 November 1953 dengan judul “Keamanan Rakjat Harus Terdjamin”, PKI menyebutkan bahwa sejak pemerintah Hatta sampai pemerintah Ali-Wongso (saat itu baru diwujudkan), PKI terus-menerus menuntut dan/atau mendesak pemerintah,

agar mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pemberantasan gerombolan DI/TII-NII Kartosuwirjo, Bosch, Smith dan berbagai teror antirakyat lainnya. PKI juga menuntut Pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa gerombolan DI/TII-NII Kartosuwirjo dan pengacau lainnya merupakan musuh Negara, musuh rakyat, dan musuh masyarakat.

Seruan PKI ini juga menyebutkan serangan, teror, penculikan dan pembunuhan, perampokan dan pembakaran milik rakyat sampai pada penggulingan kereta api dan pencegahan kendaraan, semuanya membawa kerugian bagi rakyat yang tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Berbagai gangguan keamanan ini menyebabkan pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan, termasuk yang dilakukan gerombolan bersenjata Kahar Muzakkar. PKI bahkan menuduh bahwa Kahar Muzakkar telah menjalankan politik Kolonialisme, yaitu Imperialisme dan Feodal (tuan-tanah) komprador yang bermaksud untuk menghancurkan Negara Republik Indonesia dan ingin mengembalikan sistem penjajahan di Indonesia.

Untuk menghindarkan dan menjelamatkan Republik Indonesia dari bahaya gangguan pengatjau dari gerombolan Kahar Muzakkar jang sekarang sedang mengganas, lain djalan tidak ada, ketjuali diadakannja pembasmian jang sungguh2 sampai pada akar2nja. Dan ini tidak bisa terlaksana, apabila hanja didjalankan oleh alat2 kekuasaan Negara (Tentara, Polisi dan Pamongpradja), tetapi harus ada bantuan jang sepenuhnja dari Rakjat dan seluruh lapisan masjarakat jang merupakan kekuatan Nasional jang bulat. Kekuatan Nasional jang bulat itu bisa ditjiptakan, djika ada suatu Kekuatan Tenaga2 Nasional jang ada dalam masjarakat jang turut mendukung semua tugas2 Nasional. Kekuatan Nasional jang kuat dan bulat dapat terlaksana, djika terwujud Kesatuan Kerdja sama

Nasional yang didukung oleh Partai2 Politik, Organisasi2 Rakjat (Buruh, Tani, Pemuda/ Peladjar, Wanita, Pengusaha Ketjil Pengusaha Nasional, Pedagang, Kaum Terpeladjar, Para seniman dan Ahli Budaja, para Wartawan, golongan2 dan orang2 yang progressif anti imperialis dan anti feodal komprador (APPS Vol. I, 2003: Reg. 238).

Propaganda yang dilakukan PKI ini sangat jelas untuk menarik kekuatan rakyat, partai politik, organisasi, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pikiran-pikiran PKI dalam menghancurkan Kahar Muzakkar. Dalam kunjungannya ke Makassar, D.N. Aidit bahkan menuduh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia membiayai Gerombolan DI/ TII. Aidit menganggap bangsa gerombolan DI/TII bukanlah organisasi Islam, melainkan organisasi bentukan kolonial Belanda yang berkedok agama.

Walaupun demikian, perkembangan PKI di Sulawesi Selatan tidak signifikan. Keberadaan organisasi sayapnya, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang juga terbentuk di beberapa wilayah dan menjadi salah satu penyokong PKI, juga tidak mampu berbuat banyak membangun organisasi induknya. Keberadaan Kahar Muzakkar, Masyumi, dan partai-partai yang menjadi lawan PKI, terdapat juga organisasi yang menjadi penentang PKI bernama Front Anti Komunis. Organisasi ini sangat getol menghambat pergerakan PKI. Front Anti Komunis bahkan mendirikan cabang, salah satunya di Jeneponto yang didirikan pada 8 Mei 1955 (APPS Vol. I, 2003: Reg. 237).

PKI tidak hanya berhadapan dengan kekuatan yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga harus berkonflik dengan media yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Pedoman Rakjat, salah satu media yang terbit di Makassar, memuat tentang “instruksi rahasia PKI” yang dibantah PKI. Berita ini pun kemudian dimuat kembali oleh “Abadi”

koran yang berafiliasi dengan Masyumi. Akibat berita ini, PKI mengajukan pengaduan ke Kejaksaan Agung kepada Pedoman Rakjat sebab PKI tidak pernah membuat instruksi rahasia seperti yang dituduhkan (Nieuwsgier, 20 Maret 1954: 2).

Berbagai konflik yang terjadi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara telah mempengaruhi konstelasi politik di daerah ini. Akan tetapi, konflik antara PKI dan Masyumi di Sulawesi Selatan/Tenggara, tidak begitu memberikan dampak pada partai-partai lain, kecuali PNI yang terkadang ikut terseret dalam pertarungan dua ideologi politik tersebut.

Masifnya serangan terhadap PKI ini juga menjadi salah satu penyebab yang membuat partai ini tidak mampu berkembang dengan baik. PKI tidak berhasil merebut simpati rakyat Sulawesi Selatan/Tenggara, walaupun BTI yang merupakan sayap PKI merupakan organisasi tani yang sangat besar di masa itu. Bahkan pada tahun 1953, PKI telah mengklaim memiliki anggota sekitar 100.000 orang (De Waarheid, 1 Juli 1953: 4).

Keras perseteruan yang terjadi memberikan alternatif kampanye bagi PNI dan NU yang memang berada di dalam Kabinet Ali. Kedua partai ini bahkan mengklaim sebagai partai yang mampu memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. Klaim ini sosialisasikan secara masif menjelang akhir masa kampanye. “Kalau Masyumi menang akan terjadi kekerasan; kalau PKI menang juga akan timbul kekerasan... Kalau tidak ingin terjadi kekerasan pada waktu pemilihan umum, pilihlah PNI (atau NU),” tulis Herbert Feith (1999: 24).

Kegagalan PKI pada Pemilu 1955 di Dapil Sulawesi Selatan/Tenggara

Pada pemilu 1955, posisi PKI sebagai pemenang keempat ternyata hanya diperoleh di daerah pemilihan tertentu, khususnya di

pulau Jawa. PKI tidak mengalami persebaran kemenangan yang merata di semua dapil di Indonesia. Kendati 4 partai pemenang pemilu juga mendapatkan kursi mayoritas dari pulau Jawa, akan tetapi PKI menduduki peringkat tertinggi. Secara sederhana dapat dipetakan dari perolehan suara 4 besar peserta pemilu yang menjadi pemenang secara nasional. Masyumi memiliki perwakilan di 14 daerah pemilihan, PNI di 11 daerah pemilihan, NU di 9 daerah pemilihan, PKI di 7 daerah pemilihan. Untuk pemilihan DPR, dari 57 kursi Masyumi, 28 (kurang dari 50%) berasal dari daerah pemilihan di Jawa, dari 57 kursi PNI, 45 (79%) berasal dari Jawa, dari 45 kursi NU, 37 (82%) berasal dari Jawa, dan dari 39 kursi PKI, 35 (90%) dari Jawa (*Nieuwsgier*, 6 Maret 1956: 2).

Kegagalan PKI mendapatkan suara signifikan di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara, selain masifnya stigma PKI antiagama dan anti-Tuhan, PKI juga tidak dapat berkembang dengan baik dalam hal mengembangkan struktur partai di berbagai tingkatan. Jejaring PKI ini sangat lemah di banding Masyumi atau partai lainnya yang memperoleh suara signifikan. PKI hanya mampu membentuk struktur kepengurusan partai di lima kabupaten dari delapan kabupaten yang ada. Ditambah lagi dengan komposisi kepengurusan yang tidak lengkap, serta laporan tentang jumlah keanggotaan yang tidak ada. Berdasarkan laporan dalam buku *Peta dan Daftar Partai2 Politik jang Berdasar Agama, Kebangsaan dan Marxisme dalam Propinsi Sulawesi Tahun 1955* yang diterbitkan Bahagian Politik Propinsi Sulawesi, Cabang atau Seksi Komite PKI hanya terbentuk di Kota Makassar, Kabupaten Makassar, Luwu, Parepare dan Bantaeng (Propinsi Sulawesi, 1956: 102, 105, 107, 110, 115). Sedangkan di Kabupaten Mandar, Bone, dan Sulawesi Tenggara belum terbentuk sampai pelaksanaan pemilu 1955,

meskipun BTI telah berupaya membangun jaringan di kalangan petani.

Keberadaan PKI di lima kabupaten, bersama beberapa kabupaten di wilayah Indonesia Timur ini dinaungi oleh Provinsi Komite Partai Komunis Indonesia Timur Selatan yang beralamat di Jalan Sungai Limboto Lorong. 46 No. 16 Kota Makassar. Provinsi Komite ini didirikan pada tanggal 7 Januari 1954 dengan pengurus Anwar Kadir (Sekretaris), Aminuddin Muchlis (Wakil Sekretaris) dan Moh. Junus sebagai (anggota). Di Kota Makassar, terbentuk pula Seksi Komite Partai Komunis Indonesia Kota Makassar yang beralamat di Jalan Hadji Sapiyah No. 5 dengan pengurus Aminuddin Muchlis dan Marsam Samir (Propinsi Sulawesi, 1956: 102). Adapun di Kabupaten Makassar, PKI juga berhasil membentuk Kabupaten Makassar yang berpusat di Djongaya, Sungguminasa. Seksi Komite Partai Komunis Indonesia ini dipimpin Mala (Sekretaris) dan Guling sebagai anggota (Propinsi Sulawesi, 1956: 105).

Partai Komunis Indonesia di Parepare juga terbentuk di bawah pimpinan S. Samaun. Seksi Komite ini dibentuk pada September 1954 dan diresmikan oleh Propinsi Komite PKI Sulawesi/Maluku yang diwakili oleh Machmoed Ali Soedjoed pada tanggal 24 Oktober 1954 (Propinsi Sulawesi, 1956: 107).

Di wilayah Luwu, Partai Komunis Indonesia Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Palopo dibentuk pada tanggal 10 Desember 1954 dengan T.L. Bipa (Sekretaris) dan Wakil Sekretaris dijabat Zainuddin Dg. Mazikki. Di daerah Rantepao, yang juga merupakan salah satu daerah dalam Kabupaten Luwu, PKI dibentuk pada tanggal 2 November 1954 yang dipimpin L.R. Panono (Propinsi Sulawesi, 1956: 110).

Kabupaten terakhir yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu 1955, yakni Bantaeng. Seksi Komite PKI ini didirikan pada tanggal 15 Februari 1954 dan memiliki

anggota sebanyak 500 orang. PKI di Bantaeng ini dipimpin Saijed Sakkaratuang (Sekretaris), Saijed Djalaluddin (Wakil Sekretaris I) dan sebagai Wakil Sekretaris II dijabat Saijed Muhammad M.A (Propinsi Sulawesi, 1956: 115).

Tidak mampunya PKI membangun struktur partai di daerah Sulawesi Selatan/Tenggara merupakan penyebab utama dari beberapa sebab lainnya (internal dan eksternal) yang membuat PKI tidak dapat mendulang suara seperti yang dilakukan di Jawa. Secara internal PKI tidak memiliki jejaring struktur partai yang baik dan kurang tepat dalam menempatkan calon legislatif yang diusung. Jejaring partai yang dimiliki PKI tidak mampu dibentuk di semua daerah pemilihan. Di daerah yang dibentuk pun PKI tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga peluang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sangat kecil. Tokoh-tokoh PKI yang ditempatkan dalam daftar calon DPR dan Konstituante juga bukanlah orang-orang yang berpengaruh besar dan memiliki akar yang kuat di masyarakat Sulawesi Selatan/Tenggara. Kendati ini bukan satu-satunya alasan untuk menjelaskan tentang lemahnya struktur partai di tubuh PKI, melainkan hal ini merupakan indikasi kuat bahwa PKI tidak begitu rapi dalam mengelola partai di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara. Ketidakmampuan ini tentu saja berimbas pada ketidakmampuan dalam melakukan rekrutmen keanggotaan.

Dalam penempatan calon yang diusung, baik untuk calon DPR maupun Konstituante, PKI mengusung beberapa nama yang tidak begitu familier, tidak memiliki akar yang kuat di masyarakat dan juga memiliki resistensi yang besar di Sulawesi Selatan/Tenggara. Untuk pemilihan anggota DPR, PKI menempatkan 21 orang kadernya antara lain: Dipa Nusantara Aidit (Jakarta), Ir. Sukirman (Jakarta), Karel Supit (Manado), Anwar Kadir (Makassar), Salawati,

Charlette (Makassar), dan Aminuddin Muchlis (Makassar). (Kempen [a], tanpa tahun: 175-188). Sedangkan untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI menempatkan 31 orang kadernya yang sama dengan usulan untuk DPR, ditambah beberapa orang yang berasal dari daerah antara lain: Prof. Ir. Purbadinigrat (Yogyakarta), Mr. Mohamad Jusuf (Semarang), Ahmad Alie Daeng Kulle (Palopo), Abdul Karim Kareng Ngimba (Makassar), Mathyas Sapija (Ambon), Sjamsuddin Mattaliu (Pare-pare), dan Said Sakkartuang Kr. Ngadjang (Bonthain). (Kempen [b], tanpa tahun: 277-286).

Berdasarkan data komposisi calon yang ditawarkan PKI untuk pemilihan DPR dan Konstituante di atas, terlihat asal daerah mereka hanya berfokus pada daerah-daerah di mana PKI mampu membentuk kepengurusan partai. Selebihnya berasal dari luar Sulawesi Selatan/Tenggara. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada perolehan suara PKI di daerah-daerah yang tidak terwakili. Terlebih jika calon-calon yang diusulkan tersebut tidak mampu mencari suara di tempat-tempat di mana PKI tidak memiliki basis massa.

Oleh karena itu, hal ini berakibat pada kurangnya dukungan masyarakat terhadap PKI yang berimbas pada perolehan suara PKI di pemilu 1955 (Idwar, 2021: 221-214). Besarnya resistensi partai di masyarakat juga membuat PKI tidak mampu menanamkan pengaruhnya dengan baik. Serangan dari partai politik, khususnya Masyumi dan tekanan Kahar Muzakkar, membuat PKI harus mengakui kemenangan partai-partai berdasar Agama (Keagamaan), seperti Masyumi, NU (Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Keempat partai dengan Dasar Agama ini mendominasi perolehan kursi di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara.

Kondisi yang dialami PKI di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara ini sangat berbeda dengan di Jawa. Kemampuan PKI di

dapil Jawa dalam membangun jejaring partai, meraih simpati rakyat dan mendapatkan suara mayoritas ternyata tidak mampu dilakukan di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara.

Akibatnya PKI tidak dapat meloloskan calonnya di DPR dan hanya mendapatkan 1 kursi di Konstituante. Berdasarkan hasil perhitungan suara terlihat bahwa PKI dengan perolehan suara sebanyak 17.831 tidak mampu mendudukkan calonnya. Adapun Masyumi untuk anggota DPR mendapatkan 5 kursi (446.255 suara), NU 2 kursi (159.193 suara), Parkindo 2 kursi (118.850 suara) dan PSII (114.798 suara) serta PNI (46.334) masing-masing mendapatkan 1 kursi. Adapun untuk kursi Konstituante, Masyumi mendapatkan 12 kursi (502.357 suara), NU 4 kursi (173.291 suara), Parkindo 3 kursi (114.524 suara), PSII 3 kursi (106.280 suara), PNI 2 kursi (85.144 suara), PKI 1 kursi dengan jumlah suara sebanyak 23.402 (Idwar, 2021: 221-214).

PENUTUP

Pemilu 1955, tidak hanya berbicara mengenai hasil yang diperoleh setiap peserta pemilu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses peserta pemilu dapat meraih suara. Proses inilah yang menjadi hal yang harus ditelusuri untuk memotret dinamika politik yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil pemilu 1955 di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara, PKI tidak dapat meraih suara signifikan seperti yang diperoleh di pulau Jawa. Situasi ini disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

Secara internal, PKI tidak memiliki jejaring struktur partai yang baik dan kurang tepat dalam menempatkan calon legislatif yang diusung. Jejaring partai yang dimiliki PKI tidak mampu dibentuk di semua daerah pemilihan. Di daerah yang dibentuk pun PKI tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga peluang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sangat kecil. Tokoh-tokoh PKI

yang ditempatkan dalam daftar calon DPR dan Konstituante juga bukanlah orang-orang yang berpengaruh besar dan memiliki akar yang kuat di masyarakat Sulawesi Selatan/Tenggara. Kendati hal ini bukan satu-satunya alasan untuk menjelaskan tentang lemahnya struktur partai di tubuh PKI, namun ini merupakan indikasi kuat bahwa PKI tidak begitu rapi dalam mengelola partai di dapil Sulawesi Selatan/Tenggara. Ketidakkampuan ini tentu saja berimbas pada ketidakmampuan dalam melakukan rekrutmen keanggotaan.

Secara eksternal, terjadinya persaingan keras, utamanya dengan Masyumi yang sangat giat menuding PKI sebagai partai yang antiagama dan Tuhan. Masifnya serangan yang ditujukan kepada PKI, membuat PKI sulit diterima masyarakat. Kultur masyarakat yang religius yang menyebabkan PKI tidak diterima dengan baik. Ditambah lagi dengan kerasnya penolakan Kahar Muzakkar terhadap PKI. Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan ketika itu, bahkan sangat berkeinginan untuk menggagalkan pemilu 1955.

Hal yang terpenting yang membuat PKI gagal meraih suara signifikan di Sulawesi Selatan/Tenggara, seperti di pulau Jawa adalah ketidakmampuan membangun jejaring struktur partai di semua kabupaten yang ada di dapil XII. PKI hanya mampu membentuk struktur partai di lima kabupaten dari delapan kabupaten dan tidak memiliki basis yang kuat. Padahal kekuatan sebuah partai politik untuk mendapatkan suara dalam pemilu sangat ditentukan oleh jejaring struktur partai. Kekuatan jejaring struktur partai ini menjadi modal dasar dalam membangun paradigma dalam masyarakat dan mengolah berbagai isu, sehingga sebuah partai dapat hidup dan berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D.N. 1955. *Lahirnja PKI dan Perkembangannja (1920 - 1955)*. Djakarta: Jajasan Pembaruan.
- Anwar, Idwar. 2021. *Berebut Suara di Daerah Konflik: Strategi Partai Politik pada Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2021, belum diterbitkan).
- APPS (Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi) 1950-1960 Volume I. "Berkas mengenai masalah pemilu tahun 1955. 1953-1956" (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003: Register 235).
- APPS (Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi) 1950-1960 Volume I. "Peta dan Daftar partai-partai politik di Propinsi Sulawesi, Pangkajene, Maros dan Pulau-pulau Makassar. 1955-1956" (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003: Register 237).
- APPS (Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi) 1950-1960 Volume I. "Berkas mengenai masalah yang berhubungan dengan PKI. 1954-1959" (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003: Register 238).
- APPS (Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi) Inventaris (Rahasia) 1946-1960 Volume IX Nomor I. "Gubernur Sulawesi: Laporan/Warta Politik Daerah Makassar tahun 1952-1956" (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996: Register 234).
- Benda, Harry Jindrich and Ruth Thomas McVey. *The Communism Uprisings Of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents* (New York: Cornell University Press, 1960).
- Benda, Harry Jindrich and Ruth Thomas McVey. 2009. *The Communism Uprisings Of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Singapore: Equinox Publishing..
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- De waarheid. "P.K.I. Heeft Thans Meer Dan 100.000 Leden", 1 Juli 1953.
- De Vrije Pers, "Kahar Muzakkar naar de D.I.", 2 Mei 1952.
- Djunenedding, Burhaman. 2010. *Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan* (Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2010, sudah diterbitkan).
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, terj. Nugroho Kantjasungkana. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Indische Courant voor Nederland, "P.K.I.-vergadering ontbonden", 26 April 1954.
- Indische Courant voor Nederland, "Verkiezingsborrlen PKI in Z.-Sulawesi vernield", 20 April 1955.
- Indonesia Raya, "Aidit Tuduh Perusahaan2 Belanda di Indonesia Mengongkosi Gerombolan - DI/TII Bukan Organisasi Islam, Tapi Bentukan Kolonial Berkedok Agama Katanya", 14 Maret 1955.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1954. *Kepartaian dan Parleментарia di Indonesia*. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1950. *Kepartaian di Indonesia*. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Tjalon-Tjalon Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum I 1955*. Jakarta: Kementerian Penerangan Bagian Dokumentasi, tanpa tahun.

- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Kumpulan Peraturan-peraturan untuk Pemilihan Konstituante*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, S.Stp. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Nieuwsgier, “Uit de pers - De „overkant” teleurgesteld”, 6 Maret 1956.
- Nieuwsgier, “PKI contra Pedoman Rakjat”, 20 Maret 1954.
- Pedoman Rakjat, “Jang Penting Selamatkan Negara”, 25 Juli 1955.
- Propinsi Sulawesi, *Peta dan Daftar Partai2 Politik jang Berdasar Agama, Kebangsaan dan Marxisme dalam Propinsi Sulawesi Tahun 1955* (Makassar: Bahagian Politik Propinsi Sulawesi, 1956).
- Qahhar Mudzakkar, Abdul. 1381 H/1962 M. *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia*. Tanpa Tempat: Penerbit Hasanuddin.
- Qahhar Mudzakkar, Abdul. 1382 H/1962. *Tjataan Bathin Pedjoang Islam Revolusioner (Jilid 3)*. Singapura: Qalam Press.
- Taufik Ahmad, *Kamp Pengasingan Moncongloe* (Yogyakarta: DESANTARA, 2008).
- Taufik Ahmad, *Mengail Di Air Keruh: Gerakan PKI di Sulawesi Selatan 1950-1965* (Jurnal Patanjala Volume 6 Nomor 2, Juni 2014: 301-314).